

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Partisipasi**

Partisipasi adalah tindakan turut serta atau memberikan kontribusi kepada anggota masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Cohen dan Uphoff (1980) hal 11, partisipasi adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara kerjanya; keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program dan keputusan yang telah ditetapkan melalui sumbangan sumber daya atau bekerja secara bersama-sama. Selain itu, Dwiningrum (2015) hal 8 mengutip pandangan Cohen dan Uphoff yang menekankan bahwa partisipasi adalah partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan proyek, realisasi manfaat dan pemantauan program. Lebih lanjut Cohen dan Uphoff (1977) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu: 1) *Participation in Decision Making* (partisipasi dalam pengambilan keputusan); 2) *Participation in Implementation* (Partisipasi dalam pelaksanaan); 3) *Participation in Benefits* (Partisipasi dalam pengambilan manfaat); 4) *Participation in Evaluation* (Partisipasi dalam evaluasi).

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan, ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan

dengan kualitas maupun kuantitas. Segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. Cohen dan Uphoff (1977) hal 9 menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam menerima hasil pembangunan tergantung pada distribusi maksimal suatu hasil pembangunan yang dinikmati atau dirasakan masyarakat, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Bentuk partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya.

Cohen dan Uphoff menyatakan bahwa partisipasi dapat dilihat dari banyak sudut yang berbeda (perspektif) . Pertama, kontribusi sukarela masyarakat terhadap suatu program untuk masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, serta pembagian manfaat program pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi program, sebuah proses aktif di mana orang-orang dalam masyarakat mengambil inisiatif dan menegaskan otonomi mereka. Kedua, memperkuat kontrol atas sumber daya dan mengatur institusi dalam konteks sosial yang ada. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan pembangunan di tingkat masyarakat, menjadi sangat penting.

Bentuk dari keterlibatan masyarakat dalam fase kegiatan yang disebut juga sebagai tahapan partisipasi, menurut Cohen dan Uphoff (1980) hal 13 yang membagi ke dalam empat tahapan, yakni:

- 1) Tahap perencanaan (pengambilan keputusan), diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat. Tahap perencanaan yang dimaksud disini adalah proses perencanaan suatu kegiatan.
- 2) Tahapan implementasi yang merupakan tahap terpenting dari proses pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah bagaimana implementasi pelaksanaannya. Bentuk partisipasi aktual pada tahap ini

dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu partisipasi berupa masukan gagasan, berupa kontribusi material, dan berupa keterlibatan sebagai anggota proyek.

- 3) Tahap menikmati hasil, yang menjadi indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Apalagi melihat posisi masyarakat sebagai pengembang, semakin besar manfaat proyek yang dirasakan, maka semakin besar pula keberhasilan proyek tersebut.
- 4) Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat dalam tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat membantu meningkatkan pelaksanaan proyek selanjutnya.

Selanjutnya ada dua aspek penting bagi terjalinya partisipasi antara lain :

1) Aspek pertama yakni siapa yang berpartisipasi dan bagaimana partisipasi itu dilakukan. Cohen dan Uphoff membagi masyarakat menurut latar belakang berikut tanggung jawabnya, yaitu: a) Penduduk setempat b) Tokoh masyarakat c) Pegawai pemerintah d) Tenaga kerja asing yang memenuhi syarat memainkan peran penting dalam kegiatan tersebut.

2) Aspek kedua yakni bagaimana partisipasi itu terjadi. Bagian penting ini diperhatikan oleh: a) Bagaimana inisiatif kegiatan berasal dari pengelola atau masyarakat sekitar b) Adanya dorongan partisipasi sukarela atau paksaan c) Saluran partisipasi berasal dari individu atau kelompok dalam organisasi dan apakah itu formal atau informal serta merupakan keterlibatan langsung atau keterlibatan terwakili d) Durasi berpartisipasi e) Ruang lingkup partisipasi, apakah terjadi satu kali atau berkelanjutan f) Pemberdayaan, yang bagaimana melibatkan masyarakat secara efektif dalam pengambilan keputusan dan bagaimana menerapkannya untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Menurut Isbandi (2007) hal 27 mengemukakan bahwa partisipasi adalah solusi untuk mengatasi masalah dan ketertiban dengan cara mengidentifikasi masalah dan peluang dalam masyarakat serta memilih dan menentukan solusi lain

terhadap masalah tersebut. Selama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perubahan yang terjadi. Upaya peningkatan kapasitas masyarakat harus didasarkan pada kekuatan yang dirasakan, termasuk adanya kegiatan yang menjaga kemandirian masyarakat lokal dan desa. Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan diawali dengan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan. Untuk meningkatkan dan merangsang munculnya sikap oportunistik, perlu dipahami apa sebenarnya kebutuhan individu dan masyarakat. Partisipasi adalah persoalan relasi kekuasaan atau relasi ekonomi politik yang dipelihara oleh demokrasi. Di negara demokrasi, pemerintah harus melakukan intervensi langsung terhadap warganya, dan dalam kasus lain, kendali dapat dikembalikan ke masyarakat. Gagasan lainnya adalah bahwa partisipasi dalam politik berasal dari pengembangan keterampilan individu.

Faktanya, partisipasi dipandang sebagai cara untuk bebas dan mengekspresikan diri. Selain itu, partisipasi merupakan salah satu aspek demokrasi yang berkembang dalam sistem sosial dan ekonomi. Hal ini dipertegas dengan mengutip gagasan Gaventa dan Valderma dalam Dwiningrum (2015) hal 11 yang membagi partisipasi dalam pembangunan masyarakat demokratis menjadi tiga unsur, yaitu partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat bersifat proaktif dan responsif (yaitu masyarakat berpikir dan kemudian bertindak) melalui penerapan yang bijaksana dan akuntabilitas yang konsisten. Sedangkan Sembodo (2006) hal 21 mengatakan bahwa visi Sumarto adalah partisipasi adalah suatu proses yang memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih baik antar partisipan sehingga menghasilkan kesepakatan dan inovasi dalam proses negosiasi, serta memberikan ruang untuk mendengarkan, belajar dan refleksi. Tindakan memulai bersama terjadi.

### **2.1.2 Kepemimpinan**

Kepemimpinan merupakan suatu topik bahasan yang klasik, namun tetap sangat menarik untuk diteliti karena sangat menentukan berlangsungnya suatu organisasi. Kepemimpinan itu esensinya adalah pertanggungjawaban. Masalah kepemimpinan masih sangat baik untuk diteliti karena tiada habisnya untuk dibahas disepanjang peradaban umat manusia. Terlebih pada zaman sekarang ini yang

semakin buruk saja moral dan mentalnya. Ibaratnya, semakin sulit mencari pemimpin yang baik (good leader).

Kepemimpinan yang kuat diperlukan agar organisasi dapat mencapai sasarannya. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Kepemimpinan adalah sebuah alat/sarana atau suatu proses dalam organisasi untuk membujuk orang lain agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela/sukacita dalam mencapai sasaran organisasi. Kristiadi (1996)

Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks dimana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi, misi, dan tugas, atau objektif-objektif yang dengan itu membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Seorang pemimpin itu melakukan proses ini dengan mengaplikasikan sifat-sifat kepemimpinan dirinya yaitu kepercayaan, nilai, etika, perwatakan, pengetahuan, dan kemahiran yang dimilikinya. John Gardner (1988) hal 23 Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai sekedar kekuasaan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang lain. Ada beberapa faktor yang dapat menggerakkan orang yaitu ancaman, penghargaan, otoritas dan bujukan.

Dengan adanya ancaman, maka bawahan akan takut dan mematuhi semua perintah atasan. Kepemimpinan itu pengertiannya lebih luas daripada kekuasaan karena kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi orang bukan sekedar melakukan apa yang atasan inginkan tapi juga untuk mencapai tujuan / sasaran organisasi.

Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan adalah suatu proses bagaimana menata dan mencapai kinerja untuk mencapai keputusan seperti bagaimana yang diinginkannya. Kepemimpinan adalah suatu rangkaian bagaimana mendistribusikan pengaturan dan situasi pada suatu waktu tertentu. Harbani (2018) hal 57 mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, melalui komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan.

Kepemimpinan diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan berbagai tugas yang berhubungan dengan aktivitas anggota kelompok. Kepemimpinan juga diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi berbagai strategi dan tujuan, kemampuan mempengaruhi komitmen dan ketaatan terhadap tugas untuk mencapai tujuan bersama, dan kemampuan mempengaruhi kelompok agar mengidentifikasi, memelihara, dan mengembangkan budaya organisasi. Faktor kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan team leader dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan kerja pada bawahannya. Kepemimpinan dalam organisasi memiliki peran yang sangat besar dalam membangun hubungan antar individu dan pembentuk nilai organisasi yang dijadikan sebagai pondasi dasar bagi pencapaian tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan menggerakkan atau memotivasi sejumlah orang agar secara serentak melakukan kegiatan yang sama dan terarah pada pencapaian tujuannya. Kepemimpinan juga merupakan proses menggerakkan grup atau kelompok dalam arah yang sama tanpa paksaan. (Nawawi, 2004) hal 45

Kepemimpinan (leadership) merupakan inti sari manajemen. Dengan kepemimpinan yang baik, proses manajemen akan berjalan lancar dan karyawan bergairah melaksanakan tugas-tugasnya. Gairah kerja, produktivitas kerja, dan proses manajemen suatu perusahaan akan baik, jika tipe, gaya, cara atau style kepemimpinan yang diterapkan manajernya baik. Tegasnya baik atau buruknya, tercapai atau tidaknya tujuan suatu perusahaan sebagian besar ditentukan oleh kecakapan manajer dalam melaksanakan kepemimpinannya untuk mengarahkan para bawahannya. Kecakapan dan kewibawaan seorang manajer melakukan kepemimpinannya akan mendorong gairah kerja, kreativitas, partisipasi dan loyalitas para bawahan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Leader / pemimpin adalah orangnya, sedangkan leadership ialah gaya seorang manajer untuk mengarahkan, mengkoordinasi dan membina para bawahannya agar mau bekerja sama dan bekerja produktif mencapai tujuan perusahaan.

### 2.1.2.1 Kepemimpinan Perempuan

Riska (2021) hal 14 secara etimologi pemimpin berasal dari kata pimpin yang berarti *“The art of influencing and directing means such a way to obtain their willing obedience, confidence, respect, and loyal cooperation in order to accomplish the mission”*, yang artinya kepemimpinan adalah suatu seni yang berisikan tentang mempengaruhi, menggerakkan bawahan sedemikian rupa sehingga memperoleh kepatuhan, kepercayaan, perhatian dan kerjasama secara loyal dalam menyelesaikan suatu tugas. Lebih lanjut Andriani juga memaparkan, pemimpin atau leader adalah seseorang yang mengendalikan jalannya suatu organisasi melalui bawahan-bawahannya.

Sedangkan kepemimpinan yaitu, seseorang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, serta melakukan pengaruh dan bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. Dapat disimpulkan kepemimpinan merupakan kekuasaan maupun kekuatan yang dilimpahkan kepada seseorang, sehingga ia memiliki hak seperti mengatur, mempengaruhi, menggerakkan serta bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya.

Khairin (2019) hal 16 mengatakan kata perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Oleh sebab itu tak hanya dari kaum laki-laki saja yang dihargai dan dihormati, namun kaum perempuan juga layak dan berhak untuk dihargai. Menurut Moenawar Chalil, ia menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Nilai Wanita, “perempuan yang disebut juga wanita, puteri, istri, ibu, adalah sejenis makhluk dari yang halus kulitnya, lemah sendi tulangnya dan agak berlainan bentuk serta susunan tubuhnya dengan bentuk dan susunan tubuh laki-laki”. Sehingga dapat dikatakan jika secara bentuk maupun fisik perempuan memiliki perbedaan dengan laki-laki yang terlihat jelas oleh penglihatan mata. Meski demikian adanya perbedaan bentuk fisik tersebut tidak menjadikan wanita mendapat perlakuan yang berbeda dengan laki-laki seperti, dihargai, dihormati, hak berpendapat, hak mendapatkan pekerjaan dan upah, hak perlakuan, dan lain sebagainya.

Jika kita gabungkan, kepemimpinan wanita adalah pelimpahan kekuasaan dan wewenang kepada seorang wanita sehingga dia berhak dan dapat memimpin,

mempengaruhi, menggerakkan, mengatur, mengawasi, mengurus serta bertanggung jawab atas segala yang dilakukan oleh bawahannya.

### **2.1.3 Pemberdayaan**

Mengutip pandangan Suharto (2017) hal 76 yang secara konseptual menjelaskan konsep pemberdayaan atau empowerment yang berasal dari kata “power”. Oleh karena itu, gagasan utama pemberdayaan terkait dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan sering dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Sedangkan Anwar (2007) hal 43 mengutip pandangan Kindervatter yang mengatakan bahwa pemberdayaan menjadi proses pemberian kekuatan atau daya dalam bentuk pendidikan yang ditujukan untuk membangkitkan kesadaran, pemahaman, serta kepekaan warga terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan politik, sehingga ia mampu meningkatkan dan meningkatkan posisinya di masyarakat. Kemudian Anwar (2007) mengutip pandangan Saraka yang menyebutkan bahwa pemberdayaan kini digunakan sebagai suatu tindakan, gerakan dan strategi untuk mengatasi masalah-masalah individual, dan kelompok.

Sementara menurut Prijono, S. Onny dan Pranaka (1996) hal 19 pemberdayaan yakni suatu proses terhadap masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar memiliki kapasitas atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidup dan pemberdayaan perlu diperuntukkan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Pada dasarnya, pemberdayaan didasarkan pada kekuatan di tingkat individu dan masyarakat sosial.

Menurut Suhendra (2006) hal 33 mengemukakan konsep pemberdayaan ialah suatu kegiatan yang berkelanjutan, dinamis, terpadu yang mendorong partisipasi seluruh potensi yang ada secara evolusioner, dengan partisipasi seluruh potensi daya. Dengan cara ini, akan memungkinkan pembentukan masyarakat madani yang pluralistik, sepenuhnya seimbang antara kewajiban dan hak, dengan saling menghormati di mana tidak ada yang merasa terasing dalam komunikasinya.

### **2.1.3.1 Pemberdayaan Perempuan**

Dalam konteks pemberdayaan bagi perempuan, menurut Kartasamita (1996) hal 42 yaitu upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam keadaan tidak mampu dengan mengadakan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan atau proses memampukan serta memandirikan masyarakat. Perempuan yang memberdayakan ataupun diberdayakan menekankan otonomi pengambilan keputusan perempuan sebagai kelompok masyarakat berdasarkan sumber daya pribadi secara langsung dengan partisipasi demokrasi dan pembelajaran sosial.

Selanjutnya ada lima tingkat pemerataan dalam kerangka pemberdayaan perempuan, diantaranya: 1) Memiliki pemerataan tingkat kesejahteraan kehidupan mereka; 2) Pemerataan akses, yakni meningkatkan kapasitas kemampuannya agar dapat memasuki sektor-sektor yang mendapatkan informasi, memperoleh kesempatan kerja, dan memperoleh peluang pendidikan yang setara dengan laki-laki; 3) Pemerataan kesadaran. Diharapkan dapat memahami potensi diri untuk belajar dalam proses hidup sesuai dengan kebutuhan mereka; 4) Meningkatkan atau pemerataan partisipasi aktif. Perempuan tidak lagi dilihat sebagai target atau objek pembangunan, tetapi terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program-program yang ditugaskan; 5) Pembagian kontrol yang setara, di mana partisipasi perempuan pada tingkat pengambilan keputusan tentunya nanti akan memberikan efek pemberdayaan serta jika partisipasi itu dimanfaatkan, maka kesetaraan akses ekonomi dan manfaat lainnya akan bervariasi.

### **2.1.4 Keberdayaan**

Pemberdayaan dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan akses kesejahteraan, dan kemampuan kultur serta politis. Untuk memiliki pemahaman operasional tentang fokus dan tujuan pemberdayaan, maka perlu mengetahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan menunjukkan apakah seseorang telah menerima pemberdayaan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek guna menjadi sasaran

perubahan. Berikut indikator/parameter keberdayaan yang di deskripsikan oleh Suharto (2009) hal 65:

- A. Kekuasaan di dalam (power within), Kesadaran dan keinginan untuk berubah. Konsep kekuasaan mengacu pada kesadaran diri, harga diri, identitas dan penegasan diri (mengetahui apa yang harus dilakukan). Hal ini mengacu pada bagaimana individu dapat mempengaruhi kehidupan mereka dan membuat perbedaan.
- B. Kekuasaan untuk (power to) Kapasitas kemampuan untuk meningkatkan dan mendapatkan daya akses. Kekuasaan untuk kemampuan individu dapat saja berubah, jika sanggup meningkatkan kesempatan untuk mengaksesnya.
- C. Kekuasaan atas (power over) Kemampuan menghadapi hambatan. Perubahan kekuasaan atau perilaku individu untuk mengatasi hambatan rumah tangga, masyarakat, dan pasokan tingkat makro dan kendala daya lainnya.
- D. Kekuasaan dengan (power with) Kemampuan berkelompok dan solidaritas. Peningkatan solidaritas atau aksi bersama dengan orang lain untuk mengatasi keterbatasan sumber dan kekuasaan di tingkat rumah tangga ataupun masyarakat. Secara kolektif, orang merasa memiliki kekuatan saat berkumpul untuk mengejar tujuan bersama, atau ketika bisa memperoleh berbagai visi yang sama.

### **2.1.5 Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga**

PEKKA adalah organisasi sosial yang dibentuk oleh Dinas DPPKBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak) sebagai gerakan perempuan akar rumput yang memperjuangkan hak kesetaraan dan keadilan, termasuk dalam dunia politik nasional, dan bertanggung jawab terhadap program bagi perempuan, mengupayakan definisi perempuan kepala keluarga dapat diartikan dengan berbagai macam alasan, antara lain seorang janda yang suaminya telah meninggal, seorang suami yang bercerai, seorang lajang yang menanggung beban keluarga, seorang perempuan yang suaminya cacat. Kematian atau istri dalam perkawinan, perempuan yang hamil dan melahirkan anak setelah suaminya bercerai

tidak kehilangan haknya karena suaminya pergi ke luar negeri. Kelompok perempuan ini juga mempunyai stigma dan permasalahan yang sama dengan status janda.

### **2.1.6 Program Pendidikan Kepemimpinan Perempuan**

Mengutip pemikiran Zulminarni (2017) hal 85 tentang pengembangan program baru proyek PEKKA yaitu Pelatihan Kepemimpinan Perempuan atau Academia Paradigta, sebagian besar dari mereka berharap dapat berkontribusi dalam kerja untuk berkreasi secara produktif, adil, demokratis, bersatu dan berdaulat. Masyarakat kehidupan Secara khusus Akademi bertujuan untuk: Mengembangkan kurikulum, materi, model dan buku pelatihan kepemimpinan perempuan. Hujan. Mengembangkan pemberdayaan perempuan agar dapat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan di daerahnya. c. Mengembangkan perguruan tinggi sebagai ruang pembelajaran pemberdayaan masyarakat dan kepemimpinan perempuan di segala usia, golongan dan negara. Ilmu yang dikembangkan Akademi Paradigta merupakan ilmu berharga bagi warga berdasarkan pengalaman sehari-hari. Kurikulum PEKKA mempunyai tiga pilar utama: 1) Pengembangan diri; Kuncinya adalah mengubah pola pikir Anda dari “Saya tidak bisa” menjadi “Saya bisa”. 2) Menciptakan anggota dan memperkuat komunitas. Bagaimana memahami kelompok sosial dan motivasinya. Manajemen komunitas. Alihkan fokus dari “saya” ke “kita”. 3) Keterampilan teknis Fokus pada pemahaman struktur pemerintahan, aturan dan regulasi, melakukan negosiasi, penawaran, penganggaran, dan banyak keterampilan lain yang dapat mendukung pemimpin dan benar dalam menghadapi situasi.

Penyelenggaraan kelas pelatihan diawali dengan perkenalan peserta dan disebut dengan “pendidikan”. Proses pengadaan dilakukan dengan partisipasi pemerintah daerah. Calon akan diwawancarai oleh pelatih terlatih dan asisten di lapangan. Calon harus mampu membaca dan menulis, berbicara bahasa Indonesia, mempunyai pengalaman atau aktif dalam pengabdian kepada masyarakat, serta bersedia mengikuti semua studinya dan bekerja keras menggunakan hasil pendidikannya untuk kemajuan dirinya. Kelas pelatihan diadakan di pusat PEKKA setempat. Dalam hal ini, Akademi menyelenggarakan pelatihan tersebut bekerja

sama dengan tim PEKKA. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan oleh kelompok PEKKA kota Tasikmalaya.

## **2.2 Penelitian yang Relevan**

Berikut adalah data yang menjadi tinjauan pustaka:

Pertama, jurnal penelitian yang berjudul “HUBUNGAN PARTISIPASI DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN PESERTA”, yang ditulis oleh Aldina Hapsari dan Rilus A Kinseng. Kedua penulis berasal dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor tahun 2018. Jurnal penelitian ini menganalisis partisipasi UMKM dalam program pemberdayaan dan tingkat kesejahteraan. Evaluasi partisipatif dilakukan dengan melihat tiga dari empat bagian partisipasi yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff, dan partisipasi adalah tahap pelaksanaan, tahap penilaian hasil, dan tempat evaluasi. Selanjutnya dianalisis tingkat kesejahteraan peserta setelah mengikuti program pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat partisipasi responden dalam program pengembangan usaha kecil dengan tingkat kesejahteraan responden akibat kurangnya partisipasi dalam perencanaan daerah. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara penelitian Aldina Hapsari dan Rilus A Kinseng dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Dengan kata lain, peneliti menggunakan tinjauan teori umum Cohen dan Uphoff tentang empat tahap partisipasi responden ketika menulis artikel. Orang yang berpartisipasi dalam program kebugaran. Perbedaan lainnya adalah adanya hubungan antara partisipasi peneliti dalam penulisan makalah yang berkaitan dengan teori pemberdayaan dan bukan dengan teori tingkat kesejahteraan. Selain itu, survei ini dilakukan pada perempuan pemilik rumah kelompok, bukan pada anggota usaha kecil dan menengah. Namun kedua penelitian ini memiliki karakteristik serupa. Metodologi penelitian umumnya menggunakan metode kuantitatif dan metode penelitian berdasarkan data kualitatif, seperti analisis bahan pustaka dan dokumen lainnya.

Kedua, skripsi yang berjudul “TINGKAT PARTISIPASI DAN KEMANDIRIAN ANGGOTA POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA) BIDANG EKONOMI”, yang ditulis oleh Ahmad Fanani Ulin Nuha,

mahasiswa Departement Sains dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Tahun 2019. Skripsi ini menganalisis derajat hubungan antara tingkat partisipasi dan tingkat otonomi sosial. Tingkat partisipasi diukur dari ada tidaknya faktor internal dan eksternal serta kondisi partisipasi. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat ketiga faktor tersebut maka semakin tinggi pula tingkat integrasinya. Tingkat partisipasi ini menggunakan teori Cohen dan Uphoff yang menjelaskan empat tahapan partisipasi, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi hasil. Selain itu, dengan menggabungkan hasil penelitian sebelumnya secara komprehensif, maka hasil akhirnya mempunyai kemungkinan yang lebih kuat untuk meningkatkan tingkat kekhususan responden. Sementara itu, studi yang dilakukan peneliti memberikan gambaran sejauh mana tingkat keterlibatan dikaitkan dengan derajat pemberdayaan dibandingkan derajat otonomi. Dengan demikian, topik pembahasan dalam artikel Ahmad Fanani fokus pada pemberdayaan keluarga dari segi ekonomi, sedangkan peneliti fokus pada pemberdayaan perempuan kepala rumah tangga melalui keterampilan kepemimpinan. Metode penelitian yang digunakan oleh Ahmad Fanani adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif serta analisis deskriptif relasional. Lebih lanjut, karena alasan serupa, kedua penelitian tersebut fokus pada isu hubungan antara peluang pemberdayaan.

Ketiga, jurnal penelitian yang berjudul “ANALISIS TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN KOMODITAS BUAH BELIMBING PADA KELOMPOK TANI BELIMBING DI KECAMATAN PANCORAN MAS, KOTA DEPOK”, ditulis oleh Widiyaningsih dan Mohammad Riduansyah. Kedua penulis berasal dari Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2013. Jurnal penelitian ini mengkaji permasalahan tingkat peningkatan kapasitas masyarakat melalui program pengembangan buah-buahan Kelompok Pertanian Belimbing di Kecamatan Pankoran Mas Kota Depok. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya kapasitas kelompok tani yang disebabkan oleh kurangnya minat dan kapasitas petani dalam mengembangkan tanamannya. Perbedaan penelitian Widiyaningsih dan Mohammad Riduansyah adalah hanya satu variabel

yang berhubungan dengan tingkat kontrol sosial yang dilaporkan. Sedangkan peneliti menggunakan dua variabel untuk menjelaskan hubungan partisipasi dan pemberdayaan. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah penggunaan teori pemberdayaan dari Teori Pemberdayaan Edi Suharto. Indikator pemberdayaan meliputi kekuatan yang melekat, kesadaran dan kemauan untuk berubah, kemampuan meningkatkan kapasitas dan peluang, kemampuan menghadapi hambatan, dan kemampuan bergabung atau berkelompok. Dan kedua penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dalam metode penelitiannya.

Keempat, jurnal penelitian yang berjudul “TINGKAT KEBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (KASUS PADA PROGRAM PEKKA DI DESA DAYAH TANOH KECAMATAN MUTIARA TIMUR KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH)”, ditulis oleh Elly Susanti Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh tahun 2013. Jurnal penelitian menganalisis hasil penilaian tingkat pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA) setelah mengikuti program PEKKA. Pemberdayaan diartikan sebagai peningkatan pengembangan pribadi dan kepercayaan diri terhadap kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam semua proses pengambilan keputusan, serta peningkatan kemampuan pengembangan dan harga diri. Studi menunjukkan pentingnya program ini karena merupakan kontribusi yang mengembirakan dalam memperkuat kapasitas PEKKA dengan meningkatkan mata pencaharian, membuka akses terhadap sumber daya, meningkatkan kesadaran kritis, partisipasi dan pengelolaan. Semua titik penguatan dikaitkan dengan tujuan proyek PEKKA. Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan kedepannya yaitu penelitian yang mengukur pemberdayaan dari sudut pandang lain dengan menggunakan teori Edi Suharto yang menyatakan bahwa terdapat lima kekuatan validasi setelah bergabung dengan skema PEKKA. Laporan penelitian Ellis Suzanti berfokus pada permasalahan umum program PEKKA di Desa Daya Tano, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, dan tujuan penelitian yang dilakukan peneliti adalah Program Pelatihan Kepemimpinan perempuan hanya berlaku di Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Penelitian Elis Susanti menggunakan metode analisis kualitatif dengan data primer PEKKA. Data primer

dikumpulkan melalui observasi pemangku kepentingan, wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen pendukung terkait proyek. Saat itu peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan unit kajian anggota PEKA. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui tinjauan pustaka dan tinjauan pustaka mengenai topik tersebut.

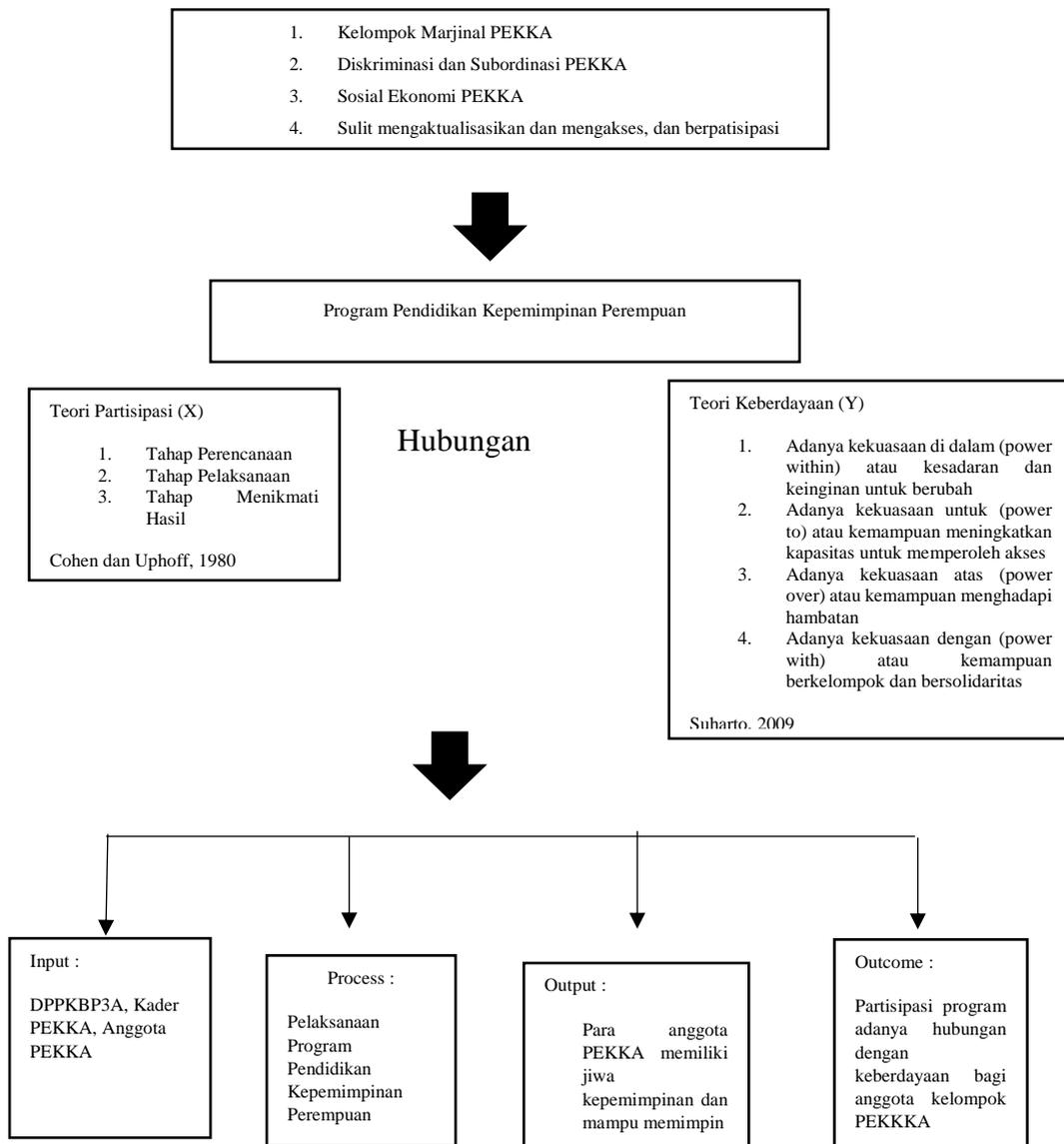
### **2.3 Kerangka Berpikir**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka perlu dilakukan analisis hubungan partisipasi anggota dengan pemberdayaan anggota PEKKA dalam program kepemimpinan perempuan desa. Data sensus yang dikumpulkan dari wilayah kerja PEKKA menunjukkan bahwa 71% rumah tangga yang dikepalai perempuan berada di bawah 40% kelas ekonomi. Karena rendahnya ekspresi pada populasi perempuan, perempuan lebih mungkin mengalami infertilitas dalam hidupnya. Pengucilan sosial membatasi partisipasi perempuan dalam masyarakat dan marginalisasi sosial. Perempuan-perempuan ini tersebar di seluruh wilayah, antara lain Provinsi Jawa Barat, Kota Tasikmalaya.

Kehidupan ini selalu dikaitkan dengan pekerjaan seluruh perempuan, yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya dengan berpartisipasi sesuai haknya sendiri. Dalam hal ini, 98% perempuan peserta program pelatihan kepemimpinan perempuan Kelompok PEKKA adalah lulusan sekolah dan berdaya menjadi pemimpin di lingkungannya. Partisipasi merupakan faktor yang mempengaruhi dan mempengaruhi pemberdayaan.

Keikutsertaan program pelatihan kepemilikan rumah pada setiap sesi pelatihan dan pengajian diberikan sebagai acuan bagi setiap anggota dan asisten belajar. Menurut Cohen dan Uphoff (1980), ada empat tahap dalam tahap integrasi: tahap perencanaan (pengambilan keputusan), tahap pelaksanaan, kepuasan terhadap hasil, dan evaluasi. Saat ini pemberdayaan diukur dengan menggunakan serangkaian indikator dari Suharto (2009). (1) Kekuatan dalam pengetahuan dan kemauan untuk berubah; (2) kapasitas atau kemampuan akses; (3) kekuatan dan kemampuan mengatasi masalah; (4) Kekuasaan atau kesanggupan untuk membentuk kesatuan

dengan suatu kelompok. Semua variabel tersebut digabungkan untuk mencari variabel bebas (efek) dan variabel terikat (efek). Oleh karena itu, peneliti berhipotesis bahwa terdapat hubungan antara kepemilikan dan pemberdayaan perempuan dalam partisipasinya dalam program pelatihan kepemimpinan perempuan kelompok PEKKA di kota Tasikmalaya



**Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir**

## **2.4 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah dugaan sementara pada rumusan masalah. Alasan disebut sementara karena jawaban berasal dari teori yang relevan, belum berasal dari fakta-fakta yang ada melalui proses pengumpulan data. Berdasarkan kerangka berpikir yang ada, maka hipotesis pada penelitian ini adalah :

Ho= Tidak ada hubungan yang signifikan antara partisipasi anggota program pendidikan kepemimpinan perempuan dengan keberdayaan perempuan di Kelompok PEKKA Kota Tasikmalaya.

Ha= Ada hubungan yang signifikan antara partisipasi anggota program pendidikan kepemimpinan perempuan dengan keberdayaan perempuan di Kelompok PEKKA Kota Tasikmalaya.